ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN PENGHULU DALAM PENETAPAN WALI PADA PERNIKAHAN DI KUA KECAMTAN

Zainal Abidin

Penghulu Ahli Madya KUA Kecamatan Juwiring Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten
dan Staf Pengajar tidak tetap Fakultas Syari'ah IIM Surakarta

Abstract

Marriage guardianship is something that is very important and is one of the pillars of marriage. Because the existence of a wali will determine whether a marriage is valid or not. There are two types of guardians in marriage, namely guardians nasab and guardians of judges. Guardianship or guardian in this marriage cannot be separated from nasab or hereditary problems, because with a legal marriage the aim is to maintain the nasab properly, regularly and uninterruptedly. In determining the marriage guardian, the headman has a very important role, which can determine whether a person can be guardian or not, and a marriage is with the guardian nasab or guardian judge. This research is a normative juridical research, with descriptive research type. The method of data collection is done by examining primary, secondary and tertiary legal materials and by making questionnaires to the princes by random means. The method used is descriptive qualitative analysis.

The results showed that the prelates were in the same trusteeship issue with the determination of different guardians. The head of the District Agama Affairs Office stipulates with the guardians of nasab while the other head of the District Office of Religious Affairs determines with the guardians of judges, there is even a determination of trustees based on the results of deliberations between the headman, bride and parents, according to the conscience and awareness of the parties. This can occur because the Marriage Law has not yet explicitly stipulated the determination of guardians, so the princes set it with understanding

Keywords: Penghulu, Determination of Guardians, Nasab, Hakim

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Dalam agama Samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama. Demikian pula dengan Negara Indonesia, karena masalah perkawinan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang intensif. Banyak aturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, terakhir adalah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 serta beberapa peraturan lain yang intinya mengatur tentang perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan itu.⁸⁸ Perkawinan dikatakan sah atau legal apabila dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun nikah adalah wali, sesuai tata peraturan urutan tentang perwalian. Apabila pernikahan dilaksanakan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun wali itu ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam (Buku Pedoman PPN)

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus diminta izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai belum berumur 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai

⁸⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Cet. 1, 2006, hal. 1-3.

umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan, Undang-Undang Perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26.⁸⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22.⁹⁰

Sebagai Penghulu sering direpotkan dengan permasalahan penetapan wali nikah, apakah wali nasab atau wali hakim. Permasalahan yang sering muncul misal penetapan wali terhadap catin yang orang tuanya hamil sebelum nikah, catin yang orang tuanya (ayah) non muslim, catin wanita yang lahir kurang atau 6 bulan sejak pernikahan orang tuanya, wali fasiq (tidak adil), wali nasab ghaib yang tidak menentu, wali enggan menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya dan lain sebagainya permasalahan orang tua sebagai wali Non Muslim atau berbeda agama dan keyakinan dengan calon mempelai perempuan, atau orang tuanya ketika nikah telah terjadi kehamilan. ***Permasalahan tersebut di atas para Penghulu masih berbeda dalam penentuan wali, sebagian ada yang menetapkan proses akad nikah dengan wali nasab dan sebagian dengan wali hakim.***

Kenyataan di lapangan dari beberapa penelitian, ditemukan perbedaan penetapan wali oleh Penghulu, seperti penelitian di KUA Keamatan Selogiri kabupaten Wonogiri, apernikahan seorang wanita dengan menggunakan Wali Hakim karena anak wanita lahir sebelum waktu 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, yang menurut aturan dalam fiqh madzab anak tersebut dikategorikan bukan anak sah. Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam KHI tentang definisi anak sah yang dibuktikan dengan adanya pernikahan yang sah tanpa membatasinya dengan waktu 6 bulan usia perkawinan tersebut.⁹¹

⁸⁹. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, Kencana, Jakarta, Cet. I, 2006, hal. 79.

⁹⁰. *Ibid*, Prof. Amir Syarifuddin

⁹¹ Haima Najachatul Mukarromah, *Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*, Tesis,

Penelitian yang lain tentang perbedaan penetapan wali nikah oleh Penghulu, ditemukan di KUA Kecamatan Sewon dan KUA Kecamatan Kotagede dalam menetapkan wali nikah bagi wanita yang lahir kurang dari 6 bulan, dimana KUA Kecamatan Kotagede menetapkan dengan Wali Nasab, sedangkan KUA Kecamatan Sewon menentukannya dengan Wali Hakim.⁹²

Ma'muroh, mendeskripsikan penelitiannya tentang penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Susukan dalam hasil pemeriksaan terhadap calon temantin setelah diketahui bahwa anak perempuan tersebut dari hasil luar nikah, kemudian menawarkan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut undang-undang yang berarti tetap menggunakan wali nasab atau menurut fiqh yang beralih kepada wali hakim, atau dengan istilah "musyawarah" sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak.⁹³

Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa yang menjadi dasar atau landasan dalam menetapkan proses akad nikah dengan wali nasab atau wali hakim? Mengapa terjadi perbedaan dalam menetapkan proses akad nikah dengan wali nasab atau wali hakim, dan bagaimana metode ijtihadnya?

Sesuai dengan judul di atas dalam karya tulis ilmiah ini, akan dianalisis tentang penetapan wali nikah. Karena dalam praktek pernikahan di KUA Kecamatan sering kita jumpai calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali karena sebab-sebab tertentu. Dalam penetapan wali para Penghulu, dari sebab-sebab wali yang sama dengan hasil penetapan yang berbeda. Hal tersebut sangat berdampak kurang baik bagi KUA Kecamatan sebagai lembaga pencatat nikah masih menghasilkan produk hukum yang tidak sama antara KUA Kecamatan yang satu dengan KUA Kecamatan lainnya.

(Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Yogyakarta, 2015, Tidak diterbitkan, t.d) dalam Saiful Millah, hal. 11).

⁹² Afif Muamar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA sewon dan KUA Kotagede)*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsyiah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, Tidak diterbitkan (t.d) dalam Saiful Millah, hal. 12.

⁹³ Ma'muroh, *"Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah" (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah Program Studi Al Akhwal Al Syakhsyiah IAIN Purwokerto, 2017, Tidak diterbitkan (t.d), hal. 75.

Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Pembahasan

Analisis terhadap perbedaan penghulu dalam penetapan wali pada pernikahan diKUA Kecamatan

A. Deskripsi Masalah

UUP tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan “Perkawinan yang dilangsungkan di muka PPN yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”. Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.⁹⁴

Keberadaan wali dalam nikah adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi. Karena suatu pernikahan tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Dari paparan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan, maka kerangka berpikir adalah, dalam suatu permasalahan wali yang sama, para penghulu masih berbeda-beda dalam penetapan wali nikah. Perbedaan timbul karena karena peraturan perundang-undangan tentang perkawinan belum mengatur secara eksplisit tentang penetapan wali. Dengan demikian para penghulu dalam penetapan wali berijtihad dengan mengacu pemahaman madzab fiqh masing-masing, terkadang juga mengacu pada Komilasi Hukum Islam yang nota bene adalah suatu kesepakatan para ulama di Indonesia atau “Fiqh ala Indonesia”. Sebagai solusi hukum segera diadakan tinjauan kembali atau revisi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia.

⁹⁴ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* hal. 65.

B. Analisis Masalah

1. Analisis Terhadap Perbedaan Penghulu Dalam Penetapan Wali

a. Analisis Siapa Yang Berhak Menjadi Wali

Dalam menetapkan wali terdapat perbedaan antara penghulu pada pernikahan di KUA Kecamatan masing-masing. Beda penetapan wali tersebut disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Disamping itu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan belum juga mengaturnya secara eksplisit, dengan demikian para penghulu dengan ijtihad masing-masing dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali dengan bekal pemahaman fiqh munakahat masing-masing dari para ulama madzab, dimana ulama madzab juga berbeda dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi dan juga persyaratan wali.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok.

Pertama, wali dekat atau *wali qarib*, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkan. Ia dapat menikahkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut (*wali mujbir*). Ketidakhakusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk menikahkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua, wali jauh atau *wali ab'ad*, yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia menikahkan ibunya sebagai wali hakim.

Adapun *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:

a). Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada

- b). Saudara laki-laki seayah, kalua tidak ada pindah kepada
- c). Anak saudara laki-laki kandung, kalua tidak ada pindah kepada d).
- Anak saudara laki-laki seayah, kalua tidak ada pindah kepada e).
- Paman kandung, kalua tidak ada pindah kepada
- f). Paman seayah, kalua tidak ada pindah kepada
- g). Anak paman kandung, kalua tidak ada pindah kepada h).
- Anak paman seayah,
- i). Ahli waris kerabat lainnya kalua ada.

Ulama Hanafiyah, menetapkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *ashabah* dalam kewarisan atau tidak, sebagai wali nasab, termasuk *zawil arham*. Menurut mereka yang mempunyai hak *ijbar* bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak *ijbar*, selama yang akan dinikahkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal nya.

Ulama Malikiyah, menempatkan seluruh kerabat nasab yang *ashabah* sebagai wali nasab dan membolehkan anak menikahkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. (Ibnu Rusyd: 19) Berbeda dengan ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak *ijbar* hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori *wali aqrab*.

b. Analisis Terhadap Perbedaan Syarat-Syarat Wali

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a). Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadis Nabi:

“Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hokum) seseorang yang tertidur samapai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat”

- b). Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula

menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Sebagaimana dijelaskan di atas.

c). Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdasar firman Alloh SWT dalam surat Ali Imran ayat 28: *“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Alloh SWT”*.

d). Orang Merdeka

e). Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hokum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

f). Berpikiran baik. Orang yang terganngu pikirannya karena ketuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

g). Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan. (al Thusiy: 163) Keharuasan wali itu adil berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat dar al-Quthniy:

“Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”

h). Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji dan umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari “Usman menurut riwayat Muslim:

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula didnikahkan oleh seseorang”

Dalam hal persyaratan ini ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang ihram.⁹⁵

Dalam hal persyaratan wali KHI dalam Pasal 20 menyatakan “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan balligh” (KHI, Pasal 20)

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Cet. 1, Jakarta, 2006, hal. 76-78.

c. Analisis Terhadap Perbedaan Urutan Hak Kewalian

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim terdapat pendapat lain. Menurut ulama hanafiyah, bila wali aqrab bepergian ke tempat jauh atau ghaib dan sulit untuk menghadirkannya hak kewalian pindah kepada wali ab'ad dan tidak kepada wali hakim. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama Malikiyah.⁹⁶

Perpindahan wali dalam KHI dinyatakan dalam Pasa 21 ayat (2), (3), (4), dan pasal 21. (KHI).

2. Analisis Solusi Hukum Terhadap Perbedaan Penghulu Dalam Penetapan Wali Nikah.

a. Analisis Wali Nikah dan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir karena keprihatian di dunia hukum (Peradilan Agama) pada saat itu belum mempunyai pedoman untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat. Para hakim Pengadilan Agama (PA) pada saat itu berpedoman pada kitab atau pendapat para madzab sesuai pemahaman masing-masing, sehingga sering menimbulkan perbedaan penetapan dan putusan antara satu PA dengan PA yang lain dalam perkara yang sama. Kondisi yang hampir sama saat sekarang sebagaimana yang dialami oleh para penghulu dalam menetapkan wali nikah sering timbul perbedaan antara penghulu yang satu dengan lainnya dalam masalah yang sama karena UUP belum mengatur secara eksplisit tentang wali nikah. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan “Perkawinan yang dilangsungkan di muka PPN yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua)

⁹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj) Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Cet. 3, Jakarta, 2007, hal. 422.

orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”

Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang KHI yang memuat Buku Perkawinan, Buku Kewarisan, dan Buku Perwakafan, merupakan Instruksi dari Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang sudah disepakati.

Sesuai dengan maksud penetapannya Instruksi Presiden tersebut hanyalah mengatur tentang soal “penyebarluasan” KHI yang telah diterima oleh para ulama, oleh karenanya adalah wajar bilamana dalam instruksi tersebut tidak kita jumpai adanya penegasan berkenaan dengan kedudukan dan fungsi dari KHI. Dalam instruksi ini tidak ada penegasan bahwa Kompilasi itu merupakan lampiran dari Instruksi Presiden dimaksud sebagaimana lazimnya kita jumpai dalam instruksi yang serupa. Dengan demikian juga tidak ada penunjukkan teks resmi dari KHI yang harus disebarluaskan.

Hanya saja dalam konsideran Inpres No. 1 Tahun 1991 secara tersirat dinyatakan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kalimat “dapat digunakan sebagai pedoman” menimbulkan kesan bahwa dalam masalah ini KHI bersifat tidak mengikat, artinya para pihak dan instansi dapat memakainya dan dapat pula tidak memakainya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan penetapan KHI. Oleh karena itu, pengertian “dapat digunakan sebagai pedoman” harus diartikan sebagai tuntunan atau petunjuk yang harus dipakai oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan mereka dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁹⁷

Singkatnya, KHI disusun dan disebarluaskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian masalah hukum perdata

⁹⁷ Aburraahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hal. 54-55.

(perkawinan, kewarisan, dan perwakafan). Disamping itu KHI merupakan langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi Hukum Perdata Nasional.

Berbicara tentang unifikasi hukum perdata nasional, sampai saat ini masih terjadi konflik tiga sistem hukum, (Hukum Islam, Hukum Sipil/Barat, dan Hukum Adat). Konflik terjadi sejak masuknya penjajah Belanda ke Indonesia, dan terus berlanjut sampai sekarang.⁹⁸

Hal tersebut mengundang keprihatinan dan sekaligus tugas BPHN dan para pakar hukum di Indonesia. Keprihatinan muncul dari para pakar hukum, diantaranya, pada tahun 1952, Prof. Kusumadi, SH., pakar hukum perdata dari UI dan UGM, mengungkapkan keheranannya karena sebagai bangsa yang berdaulat dan dalam negara kesatuan, Indonesia masih mempunyai tiga hukum perdata (Islam, Barat, dan Adat). Bahkan di perguruan tinggi hukum ada pula tiga mimbar kuliah untuk mengajarkan ketiga hukum perdata tersebut. Prof. Kusumadi menyarankan agar mimbar kuliah itu dipegang oleh seorang guru besar yang menguasai ketiga bidang hukum perdata itu. Dengan demikian lama-lama guru besar tersebut dapat menciptakan satu hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Sayang pemikiran tersebut hilang begitu saja.⁹⁹

Mencermati potret hukum perdata di Indonesia yang demikian, juga dengan lahirnya KHI yang merupakan untuk mengisi kekosongan hukum perdata (hukum perkawinan Islam), karena bersifat “tidak mengikat” dari segi peraturan perundang-undangan, maka para penghulu dalam menetapkan wali nikah berpedoman pada pengetahuan dan pemahaman fiqh madzab masing-masing, karena sejatinya KHI merupakan kesepakatan para ulama sebagai “Fiqh ala Indonesia” yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Instruksi Presiden itu merupakan *policy rules* atau *beleidsregel*, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat

⁹⁸ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Cet. 1, Jakarta, 1996, hal. 33)

⁹⁹ *Ibid*, hal. 64-65

dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa; karena secara formal ia memang tidak dapat disebut sebagai peraturan resmi yang mengatur semua orang. Karena itu, Instruksi Presiden hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal pelaksanaan tugas dan pekerjaan sesuai dengan sifatnya, yaitu sebagai *policy rules* atau *beleidsregel*.¹⁰⁰

b. Analisis Solusi Hukum Terhadap Masalah Penetapan Wali Yang Sering Menimbulkan Perbedaan

Dari data yang diperoleh melalui kuisioner dari para penghulu terhadap penetapan wali nikah, pada masalah yang sama diperoleh jawaban atau penetapan yang berbeda-beda, yaitu penghulu yang satu menetapkan dengan wali nasab sedangkan yang lain menetapkan dengan wali hakim, bahkan ada yang memakai pilihan antara wali nasab dan wali hakim setelah diadakan musyawarah dengan para pihak yang berkepentingan (Wali dan Catin).

Dari sepuluh daftar pertanyaan yang dibagikan kepada para penghulu secara acak tersebut yang masih sering berbeda, dalam menetapkan wali nikah terumata pada permasalahan:

1. Anak perempuan yang lahir 6 bulan dari pernikahan orang tuanya (kemungkinan lahir prematur).

Dari data yang masuk 30 penghulu, 63% menetapkan dengan wali nasab, 33% menetapkan dengan wali hakim, sedangkan 3% menetapkan dengan wali nasab atau wali hakim, dengan alasan sulit untuk mendapatkan bukti bahwa anak tersebut lahir dengan cara prematur.

2. Anak Perempuan Yang Lahir 6 Bulan Atau Lebih.

Para penghulu, 33% menetapkan dengan wali nasab, dan 66,7% menetapkan dengan wali hakim, dengan alasan anak sah dan anak tidak sah.

3. Wali Calon Pengantin Fasik atau Tidak Adil.

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 20)

Para penghulu, 57% menetapkan dengan wali nasab, dan 40% menetapkan dengan wali hakim, dengan alasan sulit untuk menentukan ke-*fasiq*-an seseorang.

4. Wali Calon Pengantin Sudah Udzur, Tunarungu, Tunawicara.

Terhadap masalah tersebut penghulu, 63% menetapkan dengan wali nasab, 27% menetapkan dengan wali hakim, dan 7% menetapkan dengan wali nasab dan wali hakim, dengan alasan masih dapat dengan bahasa isyarat maka nasab.

5. Wali Calon Penganti Wanita Sedang Menjalani Hukuman Penjara. Dalam permasalahan ini, penghulu 27% menetapkan dengan wali nasab, 63% dengan wali hakim, sedangkan 10% menetapkan dengan wali nasab dan wali hakim, dengan alasan selama walinya mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang maka dengan wali nasab.

6. Wali Calon Wanita Non Muslim.

Penghulu dalam hal ini, 50% menetapkan dengan wali nasab, 37% dengan wali hakim, dan 13% menetapkan antara wali nasab dan hakim.

7. Wali Tidak Berada di Tempat.

Penghulu dalam hal ini, 37% menetapkan dengan wali nasab, 53% dengan wali hakim, sedangkan 10% menetapkan antara wali nasab dan wali hakim, dengan kalau proses nikah orang tua sesuai undang-undang perkawinan dicari wali nasab yang muslim.

8. Janda Hanya Mempunyai Anak Laki-Laki.

Penghulu dalam hal ini, 27% menetapkan dengan wali nasab, dan 67% menetapkan dengan wali hakim, dengan alasan anak laki-laki bukan wali nikah.

Mencermati penetapan wali tersebut di atas karena undang-undang perkawinan belum mengatur tentang penetapan wali sehingga para penghulu dalam menetapkannya mendasarkan pada pemahaman pribadi terhadap fiqh madzab masing-masing. Kompilasi Hukum Islam memang sudah mengatur tentang perwalian namun sifat KHI sebagai aturan belum mengikat, karena KHI juga merupakan suatu kesepakatan para ulama Indonesia atau bisa

disebut “Fiqh ala Indonesia”. Perbedaan sikap para penghulu dalam menetapkan wali nikah dengan mendasarkan pada pemahaman fiqh dan peraturan (dalam hal ini KHI) menimbulkan kesan adanya ambiguitas, aturan manakah yang seharusnya digunakan dasar pengambilan dalam penetapan wali nikah? Apakah mendasarkan pemahaman fiqh madzab ataupun peraturan (dalam KHI).

Perbedaan dalam pengambilan penetapan hukum tersebut akan mengakibatkan pula pada perbedaan dalam hasil keputusan. Sehingga tidak jarang satu kasus yang sama ditetapkan secara berbeda karena mengambil dasar hukum yang berbeda. Sikap dan pendirian para penghulu dalam penetapan wali nikah masih dalam posisi “*dualisme*”. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan pada masyarakat, terutama yang menghadapi permasalahan tersebut.¹⁰¹

Kesimpulan

Dari paparan analisis tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan wali dalam akad nikah ditempatkan sebagai rukun yang harus dipenuhi, karena tanpa adanya wali hukum pernikahannya tidak sah. Dalam akad nikah itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

¹⁰¹ Saiful Millah dan Asep Saepudin dkk., *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*, Amzah, Cet. 1, Jakarta, 2019, hal. 191.

2. Penghulu dalam menetapkan permasalahan wali nikah masih ditemukan perbedaan antara penghulu KUA Kecamatan yang satu dengan Penghulu KUA Kecamatan lainnya, walaupun dihadapkan pada permasalahan yang sama. Hal tersebut menjadi preseden yang kurang baik bagi seorang penghulu sebagai Pencatat Nikah, selain itu sangat membingungkan masyarakat karena tidak ada “kepastian hukum”.

Mengapa masih terjadi perbedaan dalam penetapan wali nikah antara penghulu, hal tersebut dikarenakan para penghulu masih berijtihad sesuai kedalaman pengertian dan pemahaman kepada fiqh madzab masing-masing karena belum ada pegangan yang baku atau peratauran perundang-undangan (UUP) belum mengaturnya secara eksplisit.

3. Lahirnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tanggal 10 Juni 1991, yang merupakan hukum materiil Islam dalam hukum perdata sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum, pada kenyataannya belum mampu untuk mengisi kekosongan tersbut. Hal tersebut dapat dilihat dari segi sifat Inpres tersebut belum memenuhi tata aturan dalam peraturan perundang-undangan sehingga sifatnya tidak mengikat, atau lebih tepat sebagai kesepakatan para ulama sebagai “Fiqh ala Indonesia” yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam.

Mencermati beberapa permasalahan dan analisis di atas, apabila diperkenankan penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Perlu segera diadakan peninjauan kembali atau revisi yang komprehensif tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan di Indonesia.
2. Pelaksanaan Lomba Karya Tulis Ilmiah sebagai media uji kompetensi bagi penghulu di Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan baik, namun perlu pembinaan cara menulis dan melelit yang sesuai dengan kriteria karya ilmiah.

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Attamimi, Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara, Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Prsidrn Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta.
- Al-Shan'any, 1379 H/1960 M, *Subul al-Salam*, Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, Juz III, Kairo.
- Al Jaziri, Abdurrahman, 1969, *Kitab al Fiqh 'ala Mazaahibil al Arba'ah*, t.p., Juz IV, Mesir.
- Abdurrahman, Haji, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, AkademikaPressindo, Cet. 1, Jakarta.
- Abdullah, Abdul Gani, 1994, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, GemaInsani Press, Cet. 1, Jakarta.
- Arifin, Busthanul, Haji, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indoonesia: AkarSejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Cet. 1, Jakarta.
- Ashan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, 2007, *Subulus Salam-Syarah BulughulMaram*, dalam Muhammad Isn'an, Lc dkk (Terj), Darus Sunnah, Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami*, Dar al Fikr, Juz VII, Damsyiq.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta. Ahmad Rofiq, Haji, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Cet. 1, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PTRineka Cipta, Jakarta.
- Departemen agama RI, 1992, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV Asy-Syifa,Semarang.
- Hadari Nawawi, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada UniversityPress, Yogyakarta.
- Hadari Nawawi dan Murni Murtini, 1996, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University Press, Cet. 2, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2000, *Teori dan Politik Konstitusi*, Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.
- Martosoewignyo, Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Cet. 4, Bandung.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Cet. 1, Jakarta.
- Nur Ahmad Ghojali, Haji dan Sabit Mustamil, Haji, 2019, *Menulis Mudah KaryaIlmiah*, Samudra Biru, Cet. 1, Yogyakarta.
- Rusyd, Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, (terj) Imam Ghazali Said dan AchmadZaidun, Pustaka Amani, Cet. 3, Jakarta.
- Rahman, Fatchur, 1975, *Ilmu Waris*, PT Al Ma'arif, Cet. 10, Bandung.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah VII*, Moh. Thalib (Terj), Al-Ma'arif, Bandung.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cet. 3, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. 3, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, Kencana, Cet. 1, Jakarta.
- Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, 2019, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*, Amzah, Cet. 1, Jakarta.

B. KAMUS. ENSIKLOPEDI, JURNAL, PENELITIAN

- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir*, Pustaka Progressif, Surabaya. Haima Najachatul Mukarromah, *Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*, Tesis, (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Yogyakarta, 2015, Tidak diterbitkan, t.d).
- Afif Muamar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA sewon dan KUA Kotagede)*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Asy- Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, Tidak diterbitkan (t.d).
- Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah" (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara), Skripsi (Fakultas Syari'ah Program Studi Al Akhwal Al Syakhsiyyah IAIN Purwokerto, 2017, Tidak diterbitkan (t.d).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Departemen Agama RI, 2004, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaran Haji, Jakarta.
- Kementerian Agama RI, 2019, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Syrai'ah, Jakarta.